

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Penelitian

Di era digital, pekerja kantoran kerap menggunakan akun utama (*first account*) Instagram sebagai ruang publik yang merepresentasikan citra profesional mereka. Akun ini biasanya diikuti oleh atasan, kolega, dan klien, sehingga penggunaannya dibatasi oleh norma organisasi dan ekspektasi sosial. Konten yang dibagikan pun umumnya berkaitan dengan *personal branding*, seperti pencapaian kerja, aktivitas produktif, atau citra diri yang sesuai dengan nilai-nilai profesional. Menurut Kasperuniene & Zydziunaite (2019), individu cenderung menyesuaikan perilaku komunikasi daring mereka berdasarkan konteks sosial dan profesional yang mengelilinginya. Dalam lingkungan kerja, media sosial tidak lagi hanya berfungsi sebagai ruang ekspresi personal, tetapi juga sebagai saluran representasi profesional yang dikonstruksi secara sadar dan strategis. Hal ini menciptakan tekanan performatif yang terus-menerus, yang tidak hanya membatasi ekspresi diri secara autentik tetapi juga berpotensi memicu kelelahan emosional dalam jangka panjang.

Dalam beberapa tahun terakhir, pekerja kantoran di Asia Tenggara menghadapi tantangan yang semakin kompleks terkait kesejahteraan mereka, salah satunya adalah *burnout* yang semakin meluas. Menurut Naluri (2024), lebih dari 63% pekerja di Indonesia, Malaysia, Singapura, dan Filipina mengalami *burnout* akibat tekanan pekerjaan yang tinggi, kurangnya dukungan sosial, serta ketidakmampuan untuk memisahkan kehidupan pribadi dan profesional. *Burnout* ini tidak hanya mengurangi produktivitas kerja tetapi juga berimplikasi pada kesejahteraan mental pekerja. Kondisi ini diperburuk oleh budaya kerja di kawasan ini yang sering kali menuntut keterbukaan dan komunikasi intensif, meskipun tidak semua pekerja merasa nyaman berbagi informasi pribadi.

Seiring dengan meningkatnya kasus *burnout*, perhatian khusus perlu diberikan kepada kelompok pekerja berusia 23 hingga 35 tahun yang paling rentan mengalami kondisi ini. Penelitian oleh Angelia & Simanjorang (2024) mengungkapkan bahwa 40,3% pegawai swasta di Jakarta Selatan dalam rentang usia tersebut mengalami *burnout*. Selain itu, menurut analisis Sleep Junkie (2019) yang mengacu pada data dari ILO, *Global Employee Engagement Index*, dan *Institute for Health Metrics Organization*, Jakarta menempati peringkat keenam dari sepuluh kota dengan tingkat *burnout* tertinggi, dengan skor rata-rata 5,29. Kelompok usia ini menghadapi berbagai tantangan, seperti tekanan kerja yang tinggi, ekspektasi karir yang semakin kompleks, serta tuntutan pribadi yang berkembang. *Burnout* yang tidak dikelola dengan baik dapat berdampak negatif terhadap kesehatan mental, termasuk risiko depresi, kecemasan, hingga kecenderungan bunuh diri, serta menurunkan kesejahteraan organisasi akibat turunnya produktivitas dan keterlibatan karyawan dalam pekerjaan. Oleh karena itu, memahami faktor-faktor penyebab *burnout* pada kelompok ini menjadi penting untuk mengembangkan strategi mitigasi yang lebih efektif.

Dalam menghadapi tekanan kerja yang tinggi dan ekspektasi profesional yang terus meningkat, banyak pekerja muda mencari cara untuk mengelola stres dan mempertahankan keseimbangan hidup. Salah satu strategi yang banyak digunakan adalah media sosial, yang menjadi ruang bagi mereka untuk mencari dukungan sosial, berbagi pengalaman, dan membangun identitas digital. Laporan *We Are Social 2024* (Kemp, 2024) menunjukkan bahwa kelompok usia generasi milenial dan Gen Z merupakan pengguna aktif media sosial tertinggi di Indonesia, dengan tingkat keterlibatan yang sangat tinggi. Instagram, sebagai platform kedua yang paling sering digunakan dengan persentase mencapai 85,3%, menjadi ruang utama bagi mereka untuk mengekspresikan diri dan berbagi pengalaman pribadi. Namun, fenomena ini menciptakan dilema bagi pekerja muda, yang seringkali terjebak antara keinginan untuk berbagi kehidupan pribadi dan tuntutan menjaga citra

profesional di dunia kerja. Penelitian Tufekci (2017) menyoroti bahwa batas antara kehidupan pribadi dan pekerjaan semakin sulit dibedakan di era digital, sehingga pekerja kantor harus lebih berhati-hati dalam mengelola identitas mereka di dunia maya untuk mencegah dampak negatif terhadap karir mereka. Kondisi ini memperkuat pentingnya manajemen privasi dan kontrol atas informasi yang dapat diakses oleh rekan kerja, atasan, atau klien, guna menghindari risiko yang dapat mempengaruhi profesionalisme dan reputasi mereka di lingkungan kerja.

Selain itu, banyak pekerja muda yang merasa kehilangan kendali atas privasi mereka akibat ekspektasi perusahaan yang sering kali menormalisasi intrusi terhadap aspek pribadi kehidupan pekerja. Judith J et al., (2024) dalam Kompas.id mengungkapkan bahwa lingkungan kerja yang *toxic* menjadi salah satu faktor utama yang memperburuk kesehatan mental pekerja muda. Dalam banyak kasus, pekerja merasa tertekan untuk membagikan informasi pribadi mereka, baik secara langsung kepada rekan kerja maupun melalui platform digital seperti media sosial. Tekanan sosial dari lingkungan kerja dan digital ini semakin memperkuat tantangan yang dihadapi pekerja kantor dalam mengelola *self disclosure* di media sosial. Hal ini menambah beban emosional dan menciptakan dilema antara kebutuhan untuk menjaga privasi dan tuntutan sosial di tempat kerja karena harus menerapkan strategi privasi yang efektif agar kedua aspek tersebut tidak saling tumpang tindih.

Dengan semakin berkembangnya teknologi dan globalisasi, media sosial menjadi ruang utama bagi individu, termasuk pekerja kantor, untuk membentuk identitas digital mereka. Teknologi informasi dan komunikasi telah mengubah cara individu berinteraksi satu sama lain, terutama melalui platform media sosial. Penggunaan media sosial di Indonesia, khususnya Instagram, telah meningkat pesat dalam beberapa tahun terakhir. Instagram kini menjadi platform utama bagi banyak individu, termasuk pekerja kantor, untuk mengekspresikan diri dan berbagi pengalaman pribadi.

Dewi & Janitra (2018) berpendapat bahwa meskipun konten yang diunggah di Instagram sering kali mencerminkan identitas asli pengguna, media sosial juga memungkinkan individu menciptakan citra diri yang berbeda dari realitas sebenarnya. Hal ini menunjukkan adanya ketegangan antara kebebasan berekspresi dan kebutuhan untuk menjaga reputasi profesional di dunia maya. Dalam konteks pekerja kantoran, dilema ini menjadi semakin kompleks karena batas antara kehidupan pribadi dan profesional semakin kabur.

Penggunaan media sosial yang tinggi di kalangan pekerja kantoran tidak hanya mempengaruhi identitas pribadi mereka, tetapi juga membawa implikasi lebih luas bagi organisasi tempat mereka bekerja. Interaksi digital yang mereka lakukan dapat membentuk persepsi publik terhadap perusahaan, baik secara positif maupun negatif. Menurut Schaarschmidt & Walsh (2020), aktivitas media sosial pekerja memiliki pengaruh langsung terhadap reputasi organisasi, terutama ketika unggahan mereka mencerminkan pengalaman kerja, kebijakan perusahaan, atau hubungan antar anggota. Konten yang diunggah, baik berupa opini, diskusi informal, maupun keluhan terhadap tempat kerja dapat berdampak pada citra organisasi jika tidak dikelola dengan baik. Oleh karena itu, memahami bagaimana pekerja menavigasi komunikasi digital mereka menjadi penting, tidak hanya bagi individu tetapi juga bagi perusahaan yang ingin menjaga citranya.

Di sisi lain, komunikasi informal pekerja di media sosial juga menjadi perhatian utama bagi perusahaan. Brunner-Sperdin & Situm (2024) menyoroti bahwa sebagian besar perusahaan belum memiliki mekanisme yang jelas dalam mengelola risiko komunikasi karyawan di dunia digital, meskipun dampaknya terhadap organisasi dapat sangat signifikan. Banyak pekerja yang tidak menyadari bahwa unggahan mereka di media sosial dapat dikaitkan dengan identitas profesional mereka, yang berpotensi meningkatkan risiko kebocoran informasi atau membentuk narasi negatif terhadap perusahaan. Hal ini menunjukkan perlunya regulasi yang jelas terkait penggunaan media sosial

di lingkungan kerja, serta bimbingan bagi pekerja agar mereka lebih bijak dalam berkomunikasi secara digital.

Studi oleh Thompson et al. (2019) menunjukkan bahwa terdapat kontradiksi dalam cara pekerja dan perusahaan memandang hak privasi di media sosial. Sebanyak 57% pekerja menunjukkan sikap netral atau mendukung hak karyawan untuk mengunggah komentar kritis mengenai tempat kerja mereka. Namun, hampir setengah dari mereka juga setuju bahwa perusahaan memiliki hak untuk memantau aktivitas media sosial karyawan, meskipun hanya sepertiga yang tidak setuju dengan pengawasan tersebut. Persentase tersebut berasal dari dua pertanyaan yang berbeda, sehingga tidak bersifat kumulatif dan tidak saling menumpuk. Temuan ini mencerminkan ketegangan internal dalam sikap pekerja terhadap kebebasan berekspresi dan kontrol digital di lingkungan kerja. Dalam konteks ini, kebijakan media sosial yang kurang jelas tidak hanya dapat merugikan pekerja, tetapi juga meningkatkan risiko hukum bagi perusahaan. Jika tidak dikelola dengan baik, penyalahgunaan media sosial oleh karyawan dapat memicu tuntutan hukum atau merusak reputasi perusahaan secara keseluruhan McDonald et al. (2016).

Selain itu, penting bagi organisasi untuk memperhatikan komunikasi pekerja di media sosial guna menjaga lingkungan kerja yang sehat dan profesional. Postingan atau komentar negatif mengenai perusahaan, kolega, atau kebijakan internal yang tersebar di media sosial dapat menimbulkan konflik internal serta menurunkan loyalitas pekerja terhadap organisasi (Schaarschmidt & Walsh, 2020). Thompson et al. (2019) juga menemukan bahwa karyawan yang mengkritik kebijakan organisasi secara terbuka di media sosial seringkali berhadapan dengan reaksi dari perusahaan yang berupaya mempertahankan reputasi mereka. Hal ini menimbulkan dilema antara hak individu untuk mengekspresikan pendapat mereka dan hak organisasi untuk mengontrol persepsi publik terhadap mereka. Sejalan dengan itu, McDonald et al. (2016) menekankan bahwa perusahaan memiliki hak untuk memantau aktivitas media sosial karyawan dengan batasan hukum

tertentu, meskipun perdebatan mengenai sejauh mana hak ini dapat diterapkan masih berlangsung.

Dari temuan tersebut, terlihat jelas bahwa masih ada kesenjangan dalam pemahaman dan pengelolaan informasi di media sosial oleh pekerja. Meskipun media sosial memberikan kebebasan berekspresi, banyak pekerja yang belum memiliki kesadaran penuh bahwa aktivitas online mereka dapat berdampak pada reputasi organisasi. Bahkan dalam beberapa kasus, pekerja secara tidak sengaja membagikan informasi sensitif yang dapat menimbulkan konsekuensi bagi perusahaan Brunner-Sperdin & Situm (2024). Kasus PT Timah Tbk di Bangka Belitung menjadi contoh nyata bagaimana penggunaan media sosial tanpa kontrol dapat menimbulkan konsekuensi serius. Seorang karyawan yang membuat video parodi di tempat kerja dan mengunggahnya ke TikTok mengalami pemutusan hubungan kerja setelah unggahannya dinilai mencemarkan nama baik pegawai honorer yang menggunakan BPJS Kesehatan.

Kasus ini menunjukkan pentingnya kesadaran karyawan terhadap dampak aktivitas mereka di media sosial, baik terhadap reputasi pribadi maupun citra organisasi. Ketegangan antara kebebasan berekspresi dan pengawasan digital menjadi semakin nyata ketika media sosial berfungsi ganda sebagai ruang personal sekaligus profesional. Tantangan ini bukan hanya muncul akibat absennya regulasi yang tegas, tetapi juga karena pekerja perlu menavigasi batas komunikasi dan memaknai privasi secara mandiri dalam lingkungan digital yang terbuka. Dalam konteks ini, penting untuk meneliti bagaimana pekerja mengelola informasi pribadi di media sosial saat menghadapi tekanan profesional dan ekspektasi untuk tetap tampil terbuka secara daring.

Maka dari itu, pekerja kantoran perlu strategi khusus dalam menyeimbangkan identitas digital mereka, salah satunya dengan membatasi audiens yang dapat mengakses konten pribadi mereka. Dalam hal ini, *second account* menjadi mekanisme yang digunakan untuk mengontrol *self disclosure* dan membedakan interaksi sosial berdasarkan tingkat kepercayaan. Untuk

mengatasi masalah privasi di media sosial, fenomena penggunaan *second account* atau *Finstagram* semakin marak, terutama di kalangan pekerja muda. Fenomena ini dikenal dengan istilah *context collapse* (Boyd, 2014), yang menggambarkan kebutuhan pengguna untuk memisahkan audiens sosial mereka. Dalam hal ini, *Finstagram* dianggap menjadi solusi yang digunakan untuk mengatasi situasi tersebut. Fenomena ini menunjukkan bahwa mereka menggunakan *second account* sebagai strategi untuk memisahkan pengungkapan diri pribadi dari citra profesional mereka serta untuk membagikan konten yang lebih pribadi yang di mana menimbulkan pertanyaan penting mengenai manajemen privasi. Dengan kata lain, penggunaan *second account* bukan hanya tentang membatasi akses audiens, tetapi juga tentang bagaimana individu mengelola pengungkapan diri mereka di dunia digital sesuai dengan tingkat kepercayaan dan kenyamanan.

Dalam konteks ini, *self disclosure* menjadi aspek penting dalam penggunaan *second account*, di mana individu memilih untuk berbagi informasi hanya dengan orang-orang tertentu yang mereka anggap dapat dipercaya. Salah satu faktor internal yang memiliki peran meliputi adalah rasa percaya dan kenyamanan individu terhadap para pengikutnya. Selain hal tersebut, faktor eksternal juga dapat berdampak pada seberapa besar seseorang bersedia untuk mengungkapkan diri, khususnya akibat dorongan sosial dan lingkungan yang berkaitan dengan gaya hidup yang dianut oleh pengguna (Rini & Manalu, 2020). Kamilah & Lestari (2020) menyatakan bahwa orang cenderung lebih terbuka kepada mereka yang memberikan dukungan, meskipun respons yang diterima bisa berupa penolakan atau reaksi yang tidak menguntungkan. Dengan demikian, *self disclosure* sering kali mencerminkan harapan individu dalam membangun hubungan sosial di media sosial.

Menurut Kristanti & Eva (2022), *self disclosure* di media sosial umumnya berkaitan dengan pengungkapan informasi pribadi, seperti perasaan atau pengalaman, yang disampaikan melalui berbagai media seperti status, foto, video, dan komentar. Secara keseluruhan, pengungkapan diri memainkan

peran penting dalam memungkinkan seseorang berbagi informasi pribadi yang biasanya disembunyikan atau sedang dialami, dengan harapan dapat mempererat dan memperkuat hubungan sosial. Individu yang secara positif melakukan *self disclosure* cenderung memiliki pemahaman yang lebih baik dan lebih mendalam mengenai diri mereka, yang memungkinkan mereka lebih sadar akan aspek-aspek kepribadian dan emosional mereka (Prihantoro et al., 2020).

Walaupun pengungkapan diri dapat memperkuat hubungan sosial, ada kecemasan terkait privasi yang juga perlu diperhatikan. McAfee (2022) mencatat bahwa lebih dari 70% pengguna internet merasa khawatir tentang privasi data pribadi mereka saat menggunakan platform media sosial. Hal ini menjadi relevan bagi pekerja kantoran yang menggunakan *second account* Instagram, karena *second account* ini memungkinkan mereka untuk mengontrol informasi yang mereka ungkapkan, sambil menjaga batasan yang jelas antara kehidupan pribadi dan profesional.

Maka dari itu, jika dalam konteks pekerja kantoran, *self disclosure* yang tidak terkelola dengan baik dapat memicu konflik dengan rekan kerja atau bahkan atasan, yang pada gilirannya dapat mempengaruhi hubungan profesional dan reputasi di tempat kerja. Sebagaimana dinyatakan oleh Kristanti & Eva (2022) mengemukakan bahwa penting untuk memahami konteks komunikasi dalam era digital, di mana batasan antara ruang pribadi dan profesional menjadi semakin kabur, serta bagaimana hal ini dapat memengaruhi dinamika hubungan di tempat kerja. Dengan demikian, media sosial bisa diumpamakan sebagai pisau bermata dua, karena pada satu sisi dapat memberikan dampak positif dan sisi lainnya negatif bagi penggunanya. Jika dimanfaatkan dengan bijak, media sosial bisa menjadi alat yang bermanfaat untuk belajar, mencari inspirasi, dan membangun hubungan dengan orang-orang baru (Wardhani, 2019). Oleh karena itu, pekerja kantoran perlu menerapkan strategi privasi yang tepat agar dapat menyeimbangkan keterbukaan dan perlindungan informasi pribadi mereka di ruang digital.

Dalam upaya mengelola batasan antara kehidupan pribadi dan profesional di media sosial, teori *Communication Privacy Management (CPM)* yang dikemukakan oleh Petronio (2002) menyediakan kerangka untuk memahami bagaimana individu mengontrol akses terhadap informasi pribadi mereka. Manajemen privasi ini menjadi semakin penting bagi pekerja kantoran yang berusaha menjaga keseimbangan antara kehidupan pribadi dan profesional, serta memutuskan informasi apa yang akan dibagikan melalui *second account* dan dengan siapa informasi tersebut akan dibagikan.

Dalam konteks pekerja kantoran, *self disclosure* yang tidak terkelola dengan baik dapat memicu konflik dengan rekan kerja atau atasan, yang berpotensi mempengaruhi hubungan profesional dan reputasi di tempat kerja. Oleh karena itu, penting untuk memahami bagaimana pekerja kantoran memutuskan informasi yang akan mereka bagikan melalui *second account* dan bagaimana mereka menetapkan batasan antara identitas pribadi dan profesional di ruang digital karena pekerja kantoran sering kali terikat pada norma-norma profesional dan kode etik yang mengatur interaksi mereka di tempat kerja.

Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi bagaimana pekerja kantoran mengelola privasi dan melakukan *self disclosure* melalui *second account* Instagram mereka. Meskipun *self disclosure* dapat dilakukan di *first account*, kenyataannya banyak pekerja membatasi diri karena tekanan profesional dan ekspektasi sosial yang melekat pada akun utama yang diikuti oleh atasan, kolega, maupun klien. *Second account* kemudian muncul sebagai ruang alternatif yang dianggap lebih aman dan selektif untuk mengekspresikan sisi personal. Namun, anggapan bahwa *second account* adalah ruang “bebas risiko” justru menjadikannya menarik untuk diteliti. Ruang ini tetap menyimpan potensi kebocoran informasi, konflik relasional, bahkan konsekuensi profesional apabila tidak dikelola dengan hati-hati. Oleh karena itu, penting untuk meneliti bagaimana pekerja memilah informasi, menetapkan batas, dan menegosiasikan identitas digital mereka di ruang yang dianggap

aman namun tetap rawan. Secara keilmuan, praktik ini mencerminkan bentuk baru dari manajemen privasi digital yang belum banyak dikaji, terutama dalam konteks pekerja kantoran yang berada di bawah tekanan performatif dan tuntutan keterbukaan. Sementara secara praktis, pemahaman atas strategi ini dapat membantu individu lebih bijak dalam membatasi informasi pribadi, serta menjadi dasar bagi organisasi untuk memahami dinamika komunikasi digital karyawan agar dapat merumuskan kebijakan internal yang lebih kontekstual dan adaptif.

## 1.2 Rumusan Masalah

Dengan merujuk pada latar belakang yang telah diuraikan, pekerja kantoran saat ini dihadapkan pada tantangan yang semakin besar dalam menjaga keseimbangan antara kehidupan profesional dan pribadi, terutama di era digital yang penuh keterbukaan, di mana media sosial memainkan peran sentral dalam komunikasi sehari-hari. Instagram, sebagai salah satu platform yang paling banyak digunakan, memungkinkan pekerja kantoran untuk memisahkan *self disclosure* yang lebih pribadi dari eksposur publik melalui *second account*. Secara ideal, penggunaan *second account* ini memungkinkan pekerja kantoran untuk lebih leluasa mengekspresikan perasaan, opini, atau pengalaman mereka tanpa khawatir akan merusak citra profesional yang mereka bangun di *first account*. Namun, pada kenyataannya, meskipun *second account* dianggap sebagai ruang yang lebih aman dan pribadi, pekerja kantoran masih menghadapi tantangan dalam menjaga privasi. Ekspektasi sosial dan profesional di lingkungan kerja sering kali menimbulkan tekanan bagi pekerja untuk tetap aktif di media sosial, yang dapat mempengaruhi keputusan mereka dalam membatasi atau mengungkapkan informasi pribadi. Hal ini menciptakan dilema antara kebutuhan untuk mengekspresikan diri secara otentik dan risiko sosial maupun profesional yang dapat timbul akibat pengungkapan informasi yang tidak terkontrol.

Dalam teori *Communication Privacy Management* (CPM) yang dikemukakan oleh Petronio (2002), individu bertindak sebagai "manajer privasi", yang mengatur informasi pribadi mereka dengan menetapkan aturan terkait siapa yang dapat mengakses informasi tersebut. Elemen *Privacy Ownership* dalam teori ini menjelaskan bahwa pekerja kantoran memiliki hak penuh atas informasi yang mereka bagikan di *second account* dan bertanggung jawab dalam menentukan batasan privasi mereka. Akan tetapi, batasan privasi ini tidak selalu bersifat tetap. Elemen *Privacy Boundaries* dalam teori CPM menunjukkan bahwa pekerja harus menetapkan garis pemisah antara kehidupan pribadi dan profesional mereka di media sosial. Dalam konteks penggunaan *second account* Instagram, batasan ini dapat berupa keputusan tentang siapa yang diberikan akses sebagai *followers*, jenis informasi yang dibagikan, serta seberapa terbuka mereka dalam melakukan *self disclosure*.

Meskipun pekerja kantoran memiliki kontrol terhadap informasi pribadi mereka, teori CPM menekankan bahwa manajemen privasi tidak selalu berjalan tanpa kendala. Elemen *Privacy Control* dalam teori ini menjelaskan bagaimana individu menyesuaikan batas privasi mereka dengan kondisi sosial yang berubah, termasuk tekanan dari lingkungan kerja atau ekspektasi sosial untuk tetap aktif di media sosial. Dalam beberapa kasus, meskipun pekerja telah menetapkan batasan privasi, mereka tetap menghadapi tantangan ketika informasi pribadi mereka tersebar di luar batas yang mereka tentukan. Kondisi ini dikenal sebagai *Privacy Turbulence*, di mana aturan privasi yang sebelumnya ditetapkan mengalami gangguan atau pelanggaran, baik akibat kesalahan individu, perubahan hubungan sosial, maupun penyalahgunaan informasi oleh orang lain. Turbulensi privasi ini dapat berdampak pada hubungan profesional, terutama jika informasi pribadi yang awalnya dimaksudkan untuk audiens terbatas justru menyebar ke lingkungan kerja. Akibatnya, pekerja dapat mengalami tekanan sosial, stereotip negatif, bahkan konsekuensi profesional yang tidak diinginkan.

Selain itu, teori CPM juga menyoroti bahwa manajemen privasi tidak bersifat statis, melainkan berlangsung melalui *Rule-Based Management System*, di mana individu menerapkan aturan privasi yang mereka anggap sesuai dengan situasi tertentu. Dalam konteks *second account* Instagram, pekerja kantoran mungkin memiliki aturan spesifik tentang kapan dan dalam kondisi apa mereka merasa nyaman membagikan informasi pribadi mereka. Faktor budaya, gender, motivasi, serta manfaat dan risiko juga menjadi pertimbangan dalam menetapkan aturan privasi ini. Namun, dilema yang muncul adalah bagaimana mereka dapat tetap terbuka dalam melakukan *self disclosure* tanpa mengorbankan reputasi profesional dan organisasi mereka. Ketidakseimbangan antara keterbukaan dan perlindungan privasi ini dikenal sebagai *Privacy Management Dialectics*, yang menggambarkan konflik internal individu antara keinginan untuk berbagi informasi dengan audiens tertentu dan kebutuhan untuk menjaga privasi guna melindungi identitas profesional mereka.

Dengan demikian, penelitian ini menganalisis bagaimana pekerja kantoran menggunakan *second account* Instagram untuk mengelola privasi dan melakukan *self disclosure*. Penelitian ini juga mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan mereka dalam membagikan informasi pribadi serta bagaimana mereka menetapkan batas antara identitas pribadi dan profesional di media sosial. Selain itu, penelitian ini menjelaskan bagaimana pekerja kantoran mengatur aturan privasi dan menangani turbulensi privasi ketika batas informasi mereka dilanggar. Lebih lanjut, penelitian ini mengeksplorasi strategi yang mereka terapkan untuk menjaga keseimbangan antara kehidupan sosial, profesionalisme, dan privasi di dunia digital. Terakhir, penelitian ini menyoroti peran *second account* sebagai ruang yang memungkinkan *self disclosure* tanpa menimbulkan risiko bagi karier profesional dan organisasinya, dengan mempertimbangkan bagaimana teori *Communication Privacy Management* berperan dalam strategi privasi mereka.

### 1.3 Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dipaparkan sebelumnya, maka pertanyaan penelitian yang muncul sebagai berikut:

- 1) Bagaimana pekerja kantor menggunakan *second account* Instagram untuk mengelola privasi dalam mengontrol informasi pribadi, serta menetapkan batasan privasi mereka di media sosial?
- 2) Bagaimana pekerja kantor menetapkan aturan privasi dan menangani turbulensi privasi saat batas informasi mereka dilanggar?
- 3) Bagaimana pekerja kantor menentukan faktor yang mempengaruhi keputusan mereka dalam melakukan *self disclosure* di *second account* Instagram?

### 1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan penjelasan di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

- 1) Menganalisis dan memahami bagaimana pekerja kantor menggunakan *second account* Instagram untuk mengelola privasi dalam mengontrol informasi pribadi serta menetapkan batasan privasi mereka di media sosial.
- 2) Menjelaskan bagaimana pekerja kantor menetapkan aturan privasi serta menangani turbulensi privasi saat batas informasi mereka dilanggar.
- 3) Mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan pekerja kantor dalam melakukan *self disclosure* di *second account* Instagram.

### 1.5 Kegunaan Penelitian

#### 1.5.1 Kegunaan Akademis

Penelitian ini dapat menjadi suatu acuan akademis yang signifikan dalam mengembangkan literatur terkait *Communication Privacy Management* (CPM) dan perilaku *self disclosure* di era digital, khususnya dalam konteks penggunaan media sosial oleh pekerja kantor. Selain itu, penelitian ini dapat memperluas pemahaman terkait bagaimana *Communication Privacy Management* (CPM) dapat

diaplikasikan dalam media sosial, terutama melalui *second account* Instagram yang sebelumnya diterapkan pada komunikasi interpersonal secara langsung dengan melakukan *self disclosure* secara bijak dan tidak menjadi bumerang bagi diri sendiri, terutama dalam menjaga keseimbangan antara privasi dan eksposur di lingkungan profesional.

Selain itu, menambahkan wawasan mengenai bagaimana manajemen privasi dan pengungkapan diri di ruang digital yang dimana batas antara kehidupan profesional dan pribadi semakin kabur. Peneliti berharap kedepannya penelitian ini dapat menjadi referensi bagi akademisi dan peneliti yang ingin mengkaji perilaku pengguna media sosial di kalangan profesional, serta implikasinya terhadap privasi dan reputasi di lingkungan kerja, sehingga mendukung perkembangan studi komunikasi di ranah digital.

### **1.5.2 Kegunaan Praktis**

Penelitian ini memiliki kegunaan praktis yang penting bagi pekerja kantoran dalam memahami bagaimana mereka dapat mengelola privasi dan informasi pribadi secara lebih efektif di media sosial, khususnya melalui penggunaan *second account* di Instagram. Dengan memahami *Communication Privacy Management* (CPM), pekerja kantoran dapat lebih sadar dalam menentukan batas-batas pengungkapan diri yang tepat di antara lingkungan profesional dan pribadi. Temuan dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan panduan praktis bagi individu yang ingin menjaga reputasi profesionalnya, sekaligus tetap merasa bebas untuk membagikan hal-hal yang lebih personal di media sosial.

Di samping itu, perusahaan dan praktisi komunikasi juga dapat memanfaatkan penelitian ini untuk merumuskan kebijakan yang mendukung karyawan mereka dalam menjaga keseimbangan antara kehidupan pribadi dan profesional di ranah digital, sehingga dapat

meminimalkan potensi risiko kebocoran informasi atau konflik akibat manajemen privasi yang kurang tepat.

### 1.5.3 Kegunaan Sosial

Penelitian ini memiliki kegunaan sosial yang penting, terutama dalam meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya manajemen privasi di era digital. Dengan semakin banyaknya pekerja kantor yang aktif di media sosial, khususnya melalui *second account* Instagram, penelitian ini dapat membantu individu untuk lebih bijak dalam mengelola informasi pribadi yang mereka bagikan di dunia maya. Kesadaran akan dampak dari *self disclosure* yang berlebihan atau tidak terkontrol dapat membantu masyarakat menjaga privasi dan menghindari potensi risiko seperti penyalahgunaan informasi atau konflik sosial. Selain itu, penelitian ini juga memberikan pandangan tentang bagaimana menyeimbangkan antara identitas pribadi dan profesional di media sosial, yang dapat mendukung terciptanya hubungan sosial yang selaras dalam masyarakat yang semakin terhubung secara digital.

